

BAB VI KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Donald Trump merepresentasikan imigran Meksiko dalam diskursus politik pada periode kepemimpinan keduanya (2024–2025) melalui pidato kampanye, pidato inaugurasi, dan Executive Order. Berdasarkan analisis menggunakan pendekatan Critical Discourse Analysis Norman Fairclough, penelitian ini menemukan bahwa representasi tersebut tidak dibangun secara acak, melainkan melalui konstruksi diskursif yang sistematis untuk menghasilkan cara pandang tertentu terhadap imigran Meksiko. Bahasa dalam diskursus Trump tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi politik, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan realitas sosial yang menghubungkan isu migrasi dengan keamanan nasional, identitas kebangsaan, dan legitimasi kebijakan negara.

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa representasi imigran Meksiko dibangun melalui empat konstruksi diskursif yang saling berkaitan. Pertama, imigran direpresentasikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, ketertiban sosial, dan kedaulatan negara melalui penggunaan istilah seperti *invasion*, *criminal aliens*, *foreign terrorists*, dan *alien*. Penggunaan istilah tersebut tidak hanya menghubungkan migrasi dengan kriminalitas dan ancaman keamanan, tetapi juga mengubah persoalan migrasi menjadi persoalan eksistensial negara yang memerlukan respons luar biasa.

Kedua, diskursus tersebut secara bersamaan membangun masyarakat Amerika sebagai korban dari kebijakan imigrasi yang dianggap gagal. Melalui narasi kehilangan pekerjaan, meningkatnya kriminalitas, serta lemahnya perlindungan negara, Trump membentuk identitas kolektif bahwa warga Amerika adalah pihak yang dirugikan oleh sistem imigrasi yang berlaku.

Ketiga, kedua konstruksi tersebut kemudian menjadi dasar bagi narasi restorasi Amerika. Penelitian ini menemukan bahwa gagasan *Make America Great Again* tidak sekadar merupakan slogan kampanye, melainkan sebuah narasi restoratif yang menggambarkan Amerika sebagai bangsa yang mengalami kemunduran akibat lemahnya kontrol negara terhadap perbatasan

dan imigrasi. Dengan demikian, berbagai kebijakan seperti deportasi massal, militerisasi perbatasan, dan pengetatan penegakan hukum diposisikan sebagai langkah yang diperlukan untuk memulihkan keamanan, identitas nasional, dan otoritas negara.

Keempat, penelitian ini menemukan bahwa diskursus mengenai kewarganegaraan dan kedaulatan berfungsi untuk mempertegas batas-batas keanggotaan politik bangsa Amerika. Melalui Executive Order 14160, kewarganegaraan direpresentasikan bukan lagi sebagai hak yang melekat berdasarkan tempat kelahiran semata, tetapi sebagai hak yang harus dibatasi dan dilindungi melalui interpretasi yang lebih eksklusif terhadap prinsip kewarganegaraan Amerika.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa representasi imigran Meksiko dalam diskursus Trump bekerja melalui suatu rangkaian logika politik yang utuh: imigran dikonstruksikan sebagai ancaman, ancaman tersebut menghasilkan narasi bahwa masyarakat Amerika adalah korban, narasi korban kemudian melahirkan kebutuhan akan restorasi nasional, dan restorasi tersebut dilegitimasi melalui penguatan kedaulatan negara serta pembatasan akses terhadap komunitas politik Amerika. Dengan demikian, bahasa berfungsi bukan hanya untuk mendeskripsikan migrasi, tetapi juga untuk membentuk batas simbolik mengenai siapa yang dianggap sebagai bagian dari bangsa Amerika dan siapa yang diposisikan sebagai pihak luar.

Secara teoretis, penelitian ini menguatkan pandangan Fairclough bahwa bahasa merupakan praktik sosial yang selalu berkaitan dengan relasi kekuasaan dan ideologi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pada konteks pemerintahan Trump periode kedua, diskursus tidak berhenti pada proses representasi semata, melainkan berkembang menjadi mekanisme legitimasi kebijakan publik. Pilihan bahasa yang digunakan secara konsisten dalam kampanye, pidato resmi, dan dokumen hukum memperlihatkan bagaimana retorika politik dapat menghubungkan persepsi ancaman dengan penerimaan terhadap kebijakan yang lebih restriktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa politik memiliki kapasitas untuk mentransformasikan persoalan migrasi dari isu administratif menjadi isu keamanan, identitas nasional, dan kedaulatan

negara, sehingga memperluas legitimasi terhadap kebijakan eksklusif dalam tata kelola imigrasi Amerika Serikat.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan sejumlah saran untuk pengembangan akademik, praktik kebijakan, serta penelitian lanjutan.

Penelitian ini masih terbatas pada tiga sumber data utama dalam rentang waktu 2024—2025. Peneliti menyarankan memperluas cakupan data misalnya mencakup wawancara Trump di media sosial (Truth Social, X/Twitter), pernyataan juru bicara Gedung Putih, atau dokumentasi debat presiden. Selain dari sisi media sosial, peneliti menyarankan untuk menambah sumber data dari media berita.

Penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa politik memiliki konsekuensi nyata terhadap kelompok imigran. Oleh karena itu, pembuat kebijakan dan lembaga negara disarankan untuk mengadopsi pedoman komunikasi publik yang lebih inklusif dan berbasis bukti, menghindari penggunaan istilah-istilah dehumanisasi seperti *alien*, *illegal immigrant*, atau *invasion* yang dapat memicu xenofobia dan diskriminasi.

Penelitian ini memberikan pengetahuan agar selanjutnya mungkin dapat terwujud. Terdapat celah studi yang menjelaskan mengapa Trump secara psikologis dan politis menggunakan argumennya untuk berdebat dengan Biden dan Kamala melalui strategi kampanyenya. Selanjutnya masih minimnya penelitian tentang analisis CDA bagi negara-negara Hispanik yang masih berhubungan dengan Trump. Selain itu, masih minimnya studi tentang efektivitas EO 14159, 14160, 14161 terhadap hukum masing-masing negara federal, apakah berjalan sempurna, sebagian, atau tidak sama sekali.